

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH, M.Hum

INTISARI HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI

**CINTYA
Press**

**INTISARI HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA**

xx, 257 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran

15,5 cm x 23 cm

Oleh : Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH, MHum

Diterbitkan oleh : Cintya Press - Jakarta, 2017

ISBN 978-602-9477-37-5

Design Cover by Cintya Press / Dik's Pram

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, LINGKUP CIPTA**

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus lima ratus rupiah).

Copyright @, pada Penulis
Cintya Press - Jakarta, 2017

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	v
Pengantar Penulis	vi
Sekapur Sirih	ix
Daftar Isi	xvii
Bab 1. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI	1
A. Sejarah Pertumbuhan Konstitusi	5
B. Pengertian Konstitusi	4
C. Materi Muatan Konstitusi	7
D. Klasifikasi Konstitusi.....	9
1. Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Ter-tulsi	9
2. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi kaku (<i>flexible constitution and rigid constitution</i>)	11
3. Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi Derajat Rendah	11
4. Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan	12
5. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer	12
Bab 2. TEORI DAN FUNGSI KONSTITUSI	15
A. Teori Konstitusi	15
B. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi	18
Bab 3. HUBUNGAN KONSTITUSI DENGAN NEGARA.	21

Bab 4. MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Sejarah Mahkamah Konstitusi
- B. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....
- C. Tugas dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi
- D. Wewenang Mahkamah Konstitusi.....
- E. *Impeachment Presiden/Wakil Presiden*

Bab 5. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Pengertian Hukum Acara
- B. Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- C. Azas-azas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ..
 - 1. *Ius curiva novit*
 - 2. Persidangan Terbuka dan Umum
 - 3. *Independen* dan *imparsial*
 - 4. Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana
dan Biaya Ringan
 - 5. *Audi et alteram partem*
 - 6. Hakim Aktif Dalam Persidangan
 - 7. Azas Praduga Keabsahan
- D. Sumber-sumber Hukum Acara
- E. Susunan Peradilan

Bab 6. TATA CARA PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Pengajuan Permohonan Persidangan.....
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon
 - 3. Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon
 - 4. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Ter-
kait
- B. *Legal Standing*.....
 - 1. Proses Peradilan MK dalam Menyelesaikan
Sengketa Pemilu
 - 2. Prosedur Pengajuan Perselisihan di Mahkamah
Konstitusi
- C. Pemeriksaan Pendahuluan ..
 - 1. Tujuan Pemeriksaan Pendahuluan
- 2. Laporan Panel pada Pleno

D. Pemeriksaan Persidangan	100
Bab 7. PEMBUKTIAN	105
A. Tujuan Pembuktian	106
B. Hal-hal Yang Harus Dibuktikan	106
C. Alat-alat Bukti.....	107
Bab 8. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	113
A. Putusan Mahkamah Konstitusi	113
B. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	114
C. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi	116
D. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	118
E. Beberapa Putusan Yang Dihasilkan MK.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan (P r e a m b u l e)	131
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	153
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	193
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	204
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait	217
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait	226
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	236